



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN

2025

Laporan KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN BUDI DAYA

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 ini dapat disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. LKj Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 ini mencakup uraian pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat.

Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan Perikanan Budi Daya di masa mendatang.

Jakarta, 25 Januari 2026

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc

PERNYATAAN TELAH DI REVIU



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522805
LAMAR www.kkp.go.id SUREL ijen@kkp.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 29 Januari 2026

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur III,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Wahjudi Poerwanto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
PERNYATAAN TELAH DI REVIU.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	8
1.1. Latar Belakang	8
1.2. Maksud dan Tujuan	9
1.3. Tugas dan Fungsi.....	9
1.4. Sumberdaya Manusia	11
1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya.....	12
1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	16
BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	18
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Budi Daya	18
2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025.....	20
2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025	21
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	22
3.2. Analisis Capaian Kinerja	22
3.3 Efisiensi	35
3.4 Akuntabilitas Keuangan	36
BAB IV. PENUTUP	38
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

1.	Capaian Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025	22
2.	Perkembangan produksi perikanan budi daya Tahun 2021-2025 (Ton)	23
3.	Perkembangan Produksi Rumput Laut Tahun 2021-2025	30
4.	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Januari - Desember Tahun 2025	31
5.	Indeks Konsumsi Rumah Tangga Januari - Desember Tahun 2025	32
6.	Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Januari - Desember Tahun 2025.....	32
7.	Perbandingan Efisiensi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 dengan Tahun 2025.....	35
8.	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2021 – 2025	36
9.	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya per Jenis Belanja Tahun 2021 sampai dengan 2025	36

DAFTAR GAMBAR

1.	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	10
2.	Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja	11
3.	Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Jenis ASN	11
4.	Capaian Kinerja Tahun 2025	21
5.	Perkembangan Produksi Udang 2021-2025**	23
6.	Perkembangan produksi Bandeng 2021-2025**	24
7.	Perkembangan Produksi Kerapu 2021-2025**	25
8.	Perkembangan Poduksi Kakap 2021-2025	25
9.	Perkembangan Produksi Ikan Mas 2021-2025	26
10.	Perkembangan Produksi Ikan Nila 2021-2025**	26
11.	Perkembangan Produksi Lele 2021-2025	27
12.	Perkembangan Produksi Patin 2021-2025	27
13.	Perkembangan Produksi Gurame 2021-2025**	28
14.	Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Bulan Januari - Desember Tahun 2025	31
15.	Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2025	33
16.	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025..	37

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini, bagi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya merupakan suatu media informasi pertanggungjawaban terhadap Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Pada dasarnya akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah kepada publik merupakan kewajiban setiap Instansi Pemerintahan untuk menjelaskan (*obligation to answer*) kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada Pimpinan. Akuntabilitas ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menunjukkan keberhasilan ataupun menemukan kelemahan pelaksanaan pembangunan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melainkan juga merupakan bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut telah mengadopsi indikator kinerja utama. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menetapkan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan capaian strategis organisasi.

Perjanjian Kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025 terdiri dari 2 Sasaran Program dan 4 Indikator Kinerja. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan periodik setiap tiga bulan (triwulanan). Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) setiap periodenya.

Capaian kinerja tahun 2025 secara keseluruhan termasuk “Baik”, hal tersebut ditandai dengan pencapaian nilai kinerja organisasi tercapai secara maksimal yaitu sebesar 101,81%. Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Ditjen Perikanan Budi Daya yang menyelenggarakan pembangunan perikanan budi daya yang berkelanjutan akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan perikanan Budi Daya yang berkelanjutan.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Renstra DJPB) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran program, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi DJPB, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta dapat di revisi sesuai aturan yang berlaku.

RPJMN 2025 - 2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia Emas 2045 yaitu Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra K/L 2025-2029.

RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama transformasi Indonesia yang menargetkan kisaran pertumbuhan ekonomi 5,6-6,1 persen dengan Landasan Transformasi diantaranya : (1) Transformasi Sosial, (2) Transformasi Ekonomi, (3) Transformasi Tata Kelola, (4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia, (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan perikanan Budi Daya diperlukan Renstra DJPB Tahun 2025 – 2029 yang mengacu pada Renstra KKP. Renstra ini merupakan dokumen yang menjabarkan kebijakan dan optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan Budi Daya untuk meningkatkan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional serta peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Dokumen ini akan menjadi acuan pembangunan perikanan Budi Daya dalam lima tahun ke depan bagi pemangku kepentingan perikanan budi daya dan pihak-pihak terkait lainnya seperti Kementerian/Lembaga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota, pelaku usaha, asosiasi, praktisi dan akademisi. Renstra ini kemudian akan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja (Renja) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator

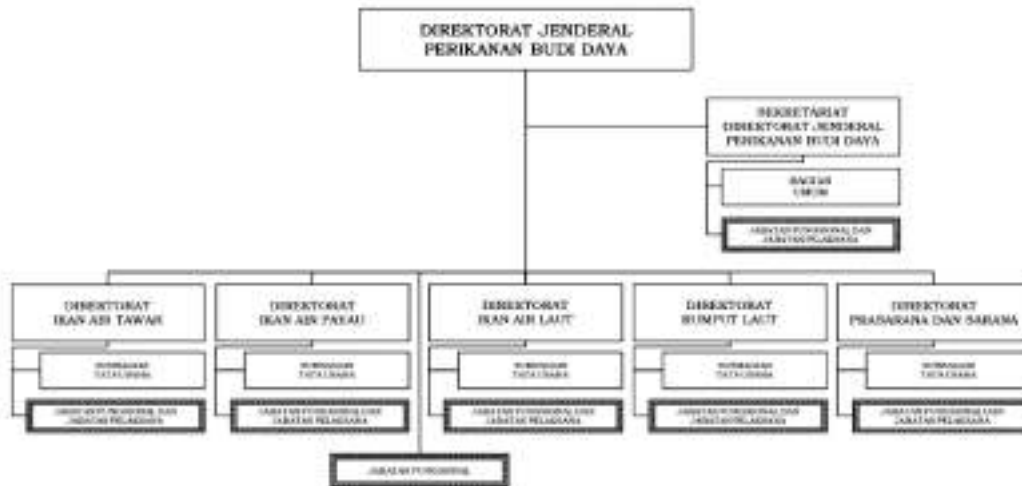
sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya. Adapun tujuan penyusunan LKj Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu kesimpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan pembangunan perikanan budi daya kedepan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tugas Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut: i) perumusan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan; ii) pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan; iii) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan; iv) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan; v) pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi perikanan budi daya, pengelolaan kawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan prasarana dan sarana pembudidayaan ikan, pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah, pengelolaan kesehatan ikan budi daya dan lingkungan pembudidayaan ikan, dan pengelolaan usaha perikanan budi daya, serta perlindungan dan pemberdayaan pembudidaya ikan.



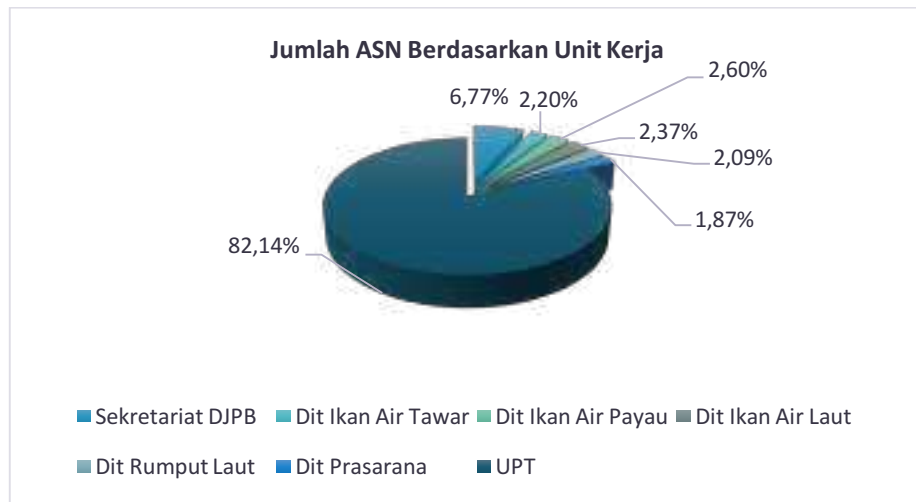
Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Selain itu DJPB juga mempunyai 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMEN-KP/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budi Daya meliputi:

1. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar Sukabumi
2. Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Payau Jepara
3. Balai Besar Perikanan Budi Daya Laut Lampung
4. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Mandingain
5. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Tatelu
6. Balai Perikanan Budi Daya Air Tawar Sungai Gelam
7. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Situbondo
8. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
9. Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
10. Balai Perikanan Budi Daya Laut Batam
11. Balai Perikanan Budi Daya Laut Lombok
12. Balai Perikanan Budi Daya Laut Ambon
13. Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekerangan (BPIUUK) Karangasem
14. Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budi Daya (BLUPPB) Karawang
15. Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (BPKIL) Serang

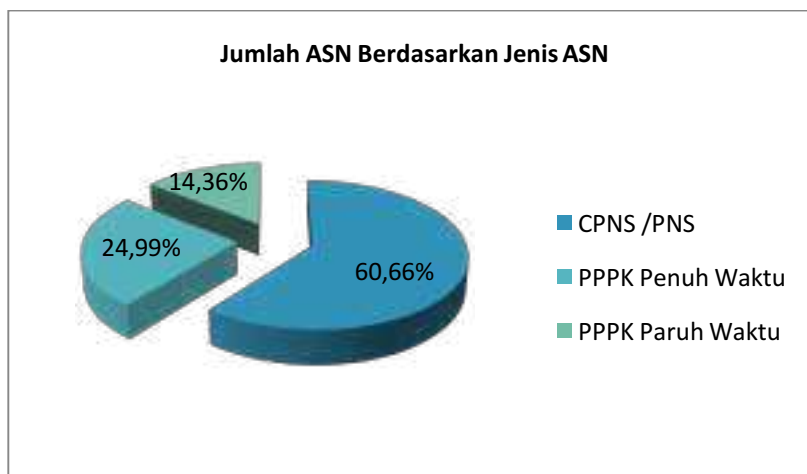
1.4. Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai DJPB (Pusat dan UPT) Tahun 2025 (data per 31 Desember 2025) adalah 1.769 orang. Pegawai DJPB tersebut tersebar pada 6 unit kerja eselon II dan 15 UPT dengan komposisi sebagai berikut : (i) Sekretariat sejumlah 119 orang (6,77%); (ii) Direktorat Ikan Air Tawar sejumlah 39 orang (2,20%); (iii) Direktorat Ikan Air Payau sejumlah 46 orang (2,60%); (iv) Direktorat Ikan Air Laut sejumlah 42 orang (2,37%) (v) Direktorat Rumput Laut sejumlah 37 orang (2,09%); (vi) Direktorat Prasarana dan Sarana sejumlah 33 orang (1,87%); dan (vii) Unit Pelaksana Teknis sejumlah 1.453 Orang (82,14%).



Gambar 2. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Unit Kerja

Apabila dilihat menurut jenis ASN, komposisi SDM Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya adalah sebagai berikut: (i) CPNS dan PNS sejumlah 1.073 orang (60,66%); (ii) PPPK Penuh Waktu sejumlah 442 orang (24,99%); dan (iii) di PPPK Paruh Waktu sejumlah 254 orang (14,36%).



Gambar 3. Jumlah pegawai DJPB berdasarkan Jenis ASN

1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan Perikanan Budi Daya

Indonesia memiliki keunggulan komparatif sebagai negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang lebih dari 95.000 km dan luas laut mencapai 6,4 juta km². Wilayah daratannya yang kaya akan sungai, danau, waduk, serta persawahan memberikan peluang besar bagi pengembangan perikanan budi daya baik di air tawar, payau, maupun laut (KKP, 2024). Berdasarkan data FAO (2023), Indonesia merupakan produsen perikanan budi daya terbesar kedua di dunia setelah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) .

Produksi perikanan budi daya nasional pada tahun 2024 mencapai 24,85 juta ton , menunjukkan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,65% per tahun selama periode 2020–2024. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan produksi perikanan budi daya global yang berada di kisaran 21% per tahun , menurut proyeksi FAO (2023).

Komoditas perikanan budi daya di Indonesia sangat beragam, dengan kurang lebih 30 jenis ikan dan biota air lainnya yang dikembangkan secara komersial. Dari jumlah tersebut, 12 komoditas utama ditetapkan sebagai prioritas dalam pembangunan perikanan budi daya, yaitu: Udang vaname (*Litopenaeus vannamei*), Kerapu tikus (*Cromileptes altivelis*), Kakap merah (*Lutjanus sp.*), Bandeng (*Chanos chanos*), Patin (*Pangasius sp.*), Nila (*Oreochromis niloticus*), Ikan mas (*Cyprinus carpio*), Lele dumbo (*Clarias gariepinus*), Gurame (*Osphronemus goramy*), Rumput laut (*Eucheuma sp.* , *Gracilaria sp.* , *Sargassum sp.*), Ikan hias (Arwana, Cupang, Oscar, dll.), dan Kepiting bakau (*Scylla serrata*).

Luas lahan potensial untuk pengembangan perikanan budi daya di Indonesia mencakup wilayah darat, pesisir, dan laut lepas, antara lain: budi daya air tawar meliputi kolam tanah, kolam beton, keramba jaring apung (KJA) di waduk, danau, dan sungai, dengan total luasan mencapai lebih dari 1,5 juta hektare . Budi daya air payau : tambak tradisional dan intensif di kawasan pesisir, dengan luas potensial mencapai 2,1 juta hektare , meskipun baru sekitar 1,2 juta hektare yang dimanfaatkan secara aktif. Budi daya laut : meliputi keramba jaring apung laut (KJAL), rumput laut, mutiara, dan budi daya kepiting/lobster di laut, dengan potensi ruang laut yang dapat dialokasikan mencapai 12 juta hektare (KKP, 2024).

Selain itu, model integrasi seperti mina padi (padi-ikan) di areal persawahan menjadi alternatif pengembangan budi daya di lahan pertanian dengan sistem pertanian terpadu. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (2023), luas sawah di Indonesia mencapai sekitar 7,4 juta hektare , dengan potensi pemanfaatan sebagian untuk mina padi.

Subsektor perikanan budi daya juga memiliki kontribusi signifikan dalam perdagangan internasional. Nilai ekspor produk perikanan budi daya pada tahun 2024 mencapai USD 5,2 miliar, didominasi oleh udang vaname, rumput laut, dan ikan hias. Indonesia saat ini menduduki posisi kedua pengekspor ikan hias terbesar di dunia, setelah Singapura, menurut data Trademap (2023).

Dengan meningkatnya permintaan global akan produk pangan asal laut yang berkelanjutan, serta dukungan kebijakan nasional dalam pengembangan ekonomi biru, potensi pengembangan

perikanan budi daya Indonesia masih sangat besar dan perlu dioptimalkan melalui pendekatan inovatif, teknologi tepat guna, dan regulasi yang kondusif.

PERMASALAHAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi perikanan budi daya yang besar, masih menghadapi sejumlah kendala yang menghambat dan menjadi tantangan pertumbuhan sektor ini. Berdasarkan data terbaru hingga 2024, berikut rangkuman tantangan beserta dampaknya:

a. Ketersediaan dan Keterbatasan Distribusi Induk Unggul dan Benih Bermutu

Ketersediaan induk dan benih unggul masih menjadi tantangan utama dalam perikanan budi daya Indonesia. Produksi induk dalam negeri belum mencukupi kebutuhan, khususnya untuk komoditas seperti udang vannamei yang masih bergantung pada impor. Upaya pemerintah membangun *Broodstock Center* belum sepenuhnya mampu mengurangi ketergantungan ini. Di sisi lain, akses terhadap benih berkualitas masih terbatas, terutama di daerah sentra produksi terpencil. Banyak pembudidaya masih menggunakan benih dari sumber yang tidak tersertifikasi, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kelangsungan hidup, pertumbuhan tidak seragam, serta meningkatnya risiko penyakit dan mortalitas.

Kualitas benih sangat bergantung pada kualitas induk. Tanpa induk yang sehat dan tersertifikasi, mustahil menghasilkan benih unggul secara konsisten. Benih bermutu penting untuk efisiensi usaha, mempercepat panen, mengurangi biaya pakan, serta menghasilkan produk budi daya yang memenuhi standar pasar.

Sebaliknya, penggunaan benih yang tidak bermutu menurunkan produktivitas, meningkatkan biaya produksi, dan menurunkan daya saing produk akuakultur nasional. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan induk, sertifikasi mutu, dan sistem distribusi benih menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan sektor ini.

Masalah utama bibit rumput laut di Indonesia adalah ketergantungan pada bibit hasil perbanyakan vegetatif; yaitu potongan tanaman yang diambil berulang kali dari induk yang sama. Praktik ini menyebabkan menurunnya kualitas genetik bibit dan membuatnya lebih rentan terhadap penyakit. Bibit yang lemah daya tahannya mudah terserang stres lingkungan, seperti perubahan suhu, salinitas, atau pencemaran. Meskipun teknologi modern seperti seleksi marka molekuler dan kultur jaringan sudah tersedia untuk menghasilkan bibit unggul, penerapannya di kalangan pembudidaya masih sangat terbatas karena minimnya pelatihan dan infrastruktur pendukung yang mendorong adopsi teknologi tersebut.

b. Tingginya Harga Pakan dan Pakan Berkualitas Rendah

Tingginya harga pakan menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan perikanan budi daya di Indonesia. Pakan menyumbang 60–70% dari total biaya produksi, dan mayoritas bahan bakunya masih bergantung pada impor seperti bungkil kedelai, tepung ikan, dan minyak nabati. Ketergantungan ini menyebabkan industri pakan sangat sensitif terhadap dinamika harga global.

Kenaikan harga yang terus terjadi memaksa banyak pembudidaya skala kecil beralih ke pakan murah yang kualitas nutrisinya rendah.

Penggunaan pakan berkualitas rendah berdampak negatif terhadap performa produksi, antara lain pertumbuhan ikan yang lambat, konversi pakan yang buruk, serta tingginya residu pakan yang mencemari lingkungan perairan. Kombinasi antara harga pakan yang mahal dan harga jual hasil panen yang fluktuatif mengurangi margin keuntungan dan meningkatkan risiko usaha. Hal ini berdampak langsung terhadap rendahnya minat investasi, sulitnya akses pembiayaan, serta lemahnya daya saing produk budi daya di pasar ekspor yang mensyaratkan standar mutu tinggi.

Upaya pemerintah seperti menjembatani kepentingan antara produsen dan pembudidaya serta mendorong inovasi pakan alternatif telah dilakukan, namun belum cukup menyelesaikan masalah di lapangan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi terintegrasi untuk mengembangkan pakan lokal berkualitas, memperkuat rantai pasok domestik, dan menstabilkan harga pakan. Keberhasilan sektor perikanan budi daya sangat bergantung pada tersedianya pakan yang terjangkau, efisien, dan ramah lingkungan sebagai fondasi utama produktivitas dan keberlanjutan usaha.

c. Penyakit Ikan, Kualitas Lingkungan dan Perubahan Iklim

Penyakit ikan akibat virus, bakteri, jamur, dan parasit masih menjadi tantangan besar dalam perikanan budi daya di Indonesia. Serangan penyakit dapat menyebabkan kematian massal dalam waktu singkat, menimbulkan kerugian ekonomi, dan menurunkan produktivitas nasional. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya penerapan biosekuriti di lapangan, serta terbatasnya fasilitas tanggap darurat dan tenaga teknis di daerah. Upaya seperti vaksinasi, penggunaan probiotik, dan monitoring kesehatan belum dilakukan secara konsisten dan merata.

Permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan kualitas lingkungan perairan yang terus menurun. Minimnya implementasi regulasi lingkungan dan rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah menyebabkan pencemaran air baku dan meningkatnya risiko kontaminasi pada produk budi daya. Selain itu, penggunaan pakan berlebih dan kepadatan tebar yang tinggi tanpa didukung pengolahan limbah melalui IPAL telah memicu akumulasi limbah organik dan eutrofikasi, yang memperburuk kondisi ekosistem perairan dan mempercepat penyebaran penyakit.

Dampak perubahan iklim juga memperberat tekanan terhadap sistem budi daya. Kenaikan suhu air, fluktuasi salinitas, serta pola hujan dan cuaca ekstrem meningkatkan stres fisiologis ikan dan menurunkan imunitasnya. Tanpa pengelolaan kualitas air yang ketat, sistem budi daya menjadi semakin rentan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola lingkungan melalui penerapan Cara Budi Daya Ikan yang Baik (CBIB), pembangunan dan penggunaan IPAL, serta pendekatan kawasan terpadu menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan, keberlanjutan, dan daya saing sektor perikanan budi daya.

d. Alih Fungsi Lahan dan Ketidakpastian Peruntukan Ruang Budi Daya

Perubahan peruntukan ruang dan lemahnya pengendalian tata guna lahan menjadi tantangan serius bagi keberlangsungan kegiatan perikanan budi daya. Alih fungsi lahan dari zona budi daya

menjadi zona lain seperti pariwisata, permukiman, industri, dan komersial telah menyebabkan berkurangnya ketersediaan ruang yang diperuntukkan secara khusus bagi kegiatan budi daya perikanan. Perubahan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi pelaku usaha, yang pada akhirnya menghambat minat investasi dan kontinuitas usaha.

Ketidakpastian alokasi ruang ini diperparah oleh lemahnya penegakan regulasi pemanfaatan ruang serta kurangnya koordinasi antar sektor di tingkat daerah. Dalam banyak kasus, zona budi daya yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah digeser atau dikurangi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha perikanan. Akibatnya, pelaku budi daya menghadapi risiko tumpang tindih dengan aktivitas sektor lain dan minimnya jaminan perlindungan ruang produksi.

Selain itu, perubahan peruntukan dan kegiatan non-perikanan di sekitar kawasan budi daya sering menimbulkan dampak lingkungan, seperti peningkatan cemaran dan degradasi kualitas air. Hal ini terjadi karena minimnya kontrol terhadap aktivitas eksternal yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem budi daya. Tanpa kepastian ruang dan perlindungan terhadap kawasan produksi, keberlanjutan dan efisiensi sektor perikanan budi daya akan semakin terancam.

e. Keterbatasan Prasarana dan Sarana Pendukung Budi Daya

Ketersediaan prasarana dan sarana pendukung merupakan faktor penting dalam menunjang produktivitas dan efisiensi usaha perikanan budi daya. Namun di banyak wilayah sentra produksi, masih dijumpai berbagai keterbatasan infrastruktur dasar seperti keterbatasan sumber air, saluran irigasi yang dangkal dan tidak terhubung dengan baik, jalan produksi yang rusak atau belum tersedia, serta akses terhadap listrik yang belum stabil atau bahkan belum terjangkau. Kondisi ini menghambat kelancaran distribusi input dan output budi daya, meningkatkan biaya operasional, serta menurunkan daya saing pelaku usaha, terutama skala kecil dan menengah.

Selain itu, sarana teknis budi daya seperti wadah budi daya (tambak, kolam, keramba), peralatan panen, sistem aerasi, dan instalasi pendukung lainnya sering belum memenuhi standar teknis yang layak. Banyak pembudidaya masih menggunakan peralatan konvensional yang tidak efisien, mudah rusak, dan tidak ramah lingkungan. Kurangnya standarisasi terhadap peralatan dan mesin budi daya juga menyebabkan variasi produktivitas yang tinggi antar pelaku usaha, serta menyulitkan dalam proses pelatihan, pendampingan, maupun pembiayaan berbasis teknologi.

Upaya modernisasi sarana prasarana budi daya juga masih menghadapi hambatan dalam aspek regulasi, pembiayaan, dan integrasi lintas sektor. Penerapan teknologi seperti sistem resirkulasi, efisiensi energi, dan pemantauan kualitas air berbasis sensor masih belum tersebar luas. Keterbatasan infrastruktur pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan budi daya juga menyebabkan peningkatan risiko pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan dan standarisasi prasarana–sarana budi daya secara berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendorong efisiensi usaha, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan transformasi sistem budi daya ke arah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

f. Kelembagaan dan Akses Permodalan Terbatas

Kelembagaan usaha perikanan udi daya di Indonesia masih didominasi oleh pembudidaya skala kecil yang menjalankan usaha secara perorangan, tidak tergabung dalam kelembagaan formal yang kuat, serta belum memiliki struktur organisasi, sistem usaha, maupun jejaring pasar yang memadai. Posisi kelembagaan pembudidaya umumnya lemah, baik dari sisi representasi, daya tawar, maupun kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi. Hal ini menyebabkan skala usaha sulit ditingkatkan, kapasitas produksi tidak efisien, serta rentan terhadap risiko usaha dan fluktuasi harga.

Kondisi tersebut diperparah oleh terbatasnya akses terhadap permodalan, terutama dari lembaga keuangan formal. Banyak pelaku usaha tidak memiliki agunan, legalitas usaha, atau kelayakan administrasi yang dipersyaratkan perbankan. Akibatnya, pengembangan usaha sangat bergantung pada bantuan pemerintah atau hibah jangka pendek yang tidak berkelanjutan. Ketergantungan ini memperkuat siklus stagnasi usaha dan memperlemah kemandirian pembudidaya, baik dari aspek keuangan, produksi, maupun kelembagaan.

Untuk memperkuat keberlanjutan usaha, diperlukan upaya peningkatan kapasitas teknis dan manajerial pelaku budi daya agar mampu mengelola usaha secara modern dan profesional. Penguatan kelembagaan dalam bentuk koperasi, kelompok usaha bersama, atau korporatisasi pembudidaya juga menjadi krusial untuk meningkatkan efisiensi, akses pasar, dan kelayakan pembiayaan. Tanpa intervensi yang sistematis dan kolaboratif, transformasi sektor budi daya menuju sistem usaha yang berdaya saing akan sulit terwujud

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya selama tahun 2025.
2. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKj.
3. Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada tahun 2025 – 2029, rencana kerja dan anggaran tahun 2025, penetapan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta pengukuran/pengelolaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.
4. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja (IK) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2025

Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.

5. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang capaian, permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya berupa perbaikan perencanaan, kebijakan, dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

BAB II. PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Budi Daya

Visi

Visi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 2025-2029 sejalan dengan Visi Presiden serta Visi KKP yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai unit kerja yang berperan sentral dalam pembangunan subsektor perikanan budi daya, DJPB mendukung transformasi ekonomi biru melalui praktik budi daya yang efisien, adaptif terhadap perubahan iklim, serta inklusif bagi pelaku usaha skala kecil. DJPB turut mendorong peningkatan kapasitas produksi, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, serta penyediaan pangan akuatik berkualitas untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan mandat dan peran strategis tersebut, DJPB menetapkan visi jangka menengah tahun 2025–2029 sebagai berikut:

“Perikanan Budi Daya yang Maju, Berkelanjutan, dan Tangguh untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat.”

Penjelasan elemen visi tersebut adalah sebagai berikut:

- **Maju:** Mewakili transformasi sektor perikanan budi daya menuju sistem yang modern dan efisien, melalui peningkatan penggunaan teknologi, digitalisasi proses produksi, inovasi kelembagaan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- **Berkelanjutan:** Menunjukkan komitmen terhadap praktik budi daya yang menjaga keseimbangan ekologi, memperhatikan daya dukung lingkungan, dan menjamin keberlangsungan usaha dari sisi sosial maupun ekonomi.
- **Tangguh:** Menggambarkan ketahanan sektor budi daya dalam menghadapi dinamika global dan tantangan lokal, seperti perubahan iklim, fluktuasi harga input, risiko penyakit ikan, dan gangguan rantai pasok. Visi ini mencerminkan daya adaptasi, resiliensi, dan stabilitas sistem budi daya secara menyeluruh.
- **Ketahanan pangan dan kesejahteraan Masyarakat:** Menjadi tujuan utama pembangunan, yaitu menjadikan subsektor perikanan budi daya sebagai sumber protein hewani yang aman dan bergizi serta sebagai pendorong ekonomi rakyat, khususnya di wilayah pesisir dan perdesaan.

Misi

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya menjalankan Misi ke-2, yaitu “Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sub-sektor perikanan budi daya terhadap perekonomian sektor perikanan nasional”. Misi utama DJPB di atas didukung dengan Misi ke-8, yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja DJPB di pusat dan daerah.

Tujuan

Sebagai penjabaran langsung dari misi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025–2029, ditetapkan tujuan strategis yang menjadi arah pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan subsektor perikanan budi daya. Tujuan ini mendukung pencapaian visi DJPB serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, transformasi ekonomi biru, dan tata kelola pemerintahan yang adaptif.

Tujuan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025–2029:

1. Meningkatkan volume, efisiensi, dan kesinambungan produksi perikanan budi daya dalam rangka memperkuat penyediaan protein akuatik nasional secara berkelanjutan, berbasis kawasan produktif dan teknologi ramah lingkungan.
2. Meningkatkan kemandirian ekonomi dan daya tahan usaha pembudi daya melalui penguatan kelembagaan, dukungan sarana produksi, akses pembiayaan, dan peningkatan kapasitas usaha berbasis potensi lokal.
3. Mengembangkan sistem usaha Budi Daya yang responsif terhadap tantangan iklim dan teknologi melalui penyediaan input produksi berkualitas, penerapan inovasi Budi Daya modern, serta optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana berstandar.
4. Mewujudkan tata kelola subsektor perikanan budi daya yang akuntabel, efisien, dan berbasis data dengan memperkuat sistem perencanaan, pengawasan, digitalisasi layanan publik, dan kinerja Badan Layanan Umum sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

Sasaran Strategis

Sasaran program pembangunan perikanan budi daya merupakan kondisi yang diinginkan untuk dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai suatu hasil dan dampak (*outcome*) dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Program (SP) DJPB tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut: SP1. Meningkatnya produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan; SP2. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pembudi daya; dan SP3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan perikanan budi daya, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Sasaran Program pertama (SP-1)** yang akan dicapai adalah: Meningkatnya produksi perikanan budi daya secara berkelanjutan dengan indikator kinerja:
 - a. Volume Produksi Rumput Laut dengan target 11,64 juta ton di 2025 dan 14,14 juta ton di tahun 2029;
 - b. Volume Produksi Ikan Budi Daya dengan target 6,75 Juta Ton di 2025 dan 8,52 Juta Ton di tahun 2029;
 - c. Nilai Tukar PemBudi Daya Ikan (NTPi) dengan target 103,25 di 2025 dan 104,25 di tahun 2029;
2. **Sasaran Program ke-dua (SP-2)** yang akan dicapai adalah: Meningkatnya kapasitas dan kemandirian kelembagaan ekonomi pembudi daya, dengan indikator kinerja: Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang ditingkatkan kelembagaan ekonominya dengan target 10 unit di 2026 dan 15 unit di tahun 2029.
3. **Sasaran Program ke-tiga (SP-3)** yang akan dicapai adalah: Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengelolaan perikanan budi daya, dengan Indikator Kinerja: Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya 86 di 2025 dan 88 di tahun 2029.

Sasaran Program di atas mendukung pencapaian dua Sasaran Strategis (SS) KKP, yakni SS-2: Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan dan SS-5: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas..

2.2. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽³⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2025 dilakukan revisi karena pada TW 4 mengacu pada Renstra DJPB 2025-2029 sementara pada TW 1 sampai dengan TW 3 karena masa transisi maka RK level 1 mengacu pada Rencana Kerja DJPB 2025-2029. Dokumen

Penetapan Kinerja awal sebagaimana pada lampiran 1 sementara Penetapan kinerja revisi pada lampiran 2.

2.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi indikator Kinerja atau Manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan implemementasi Aplikasi "Kinerjaku", berikut capaian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Tahun 2025.



Gambar 4. Capaian Kinerja Tahun 2025

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kegiatan pembangunan perikanan budi daya pada tahun 2025 sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya menitikberatkan pada dua Sasaran Program dengan empat Indikator Kinerja untuk menunjang pencapaian visi dan misi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan hasil pengukuran kinerja inilah yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja (LKj) tingkat Eselon I.

Adapun rekapitulasi capaian kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada Tahun 2025 seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
1	Produksi Perikanan Budi Daya (juta ton)	6,75	6,76	100,15
2	Produksi Rumput Laut	11,64	11,65	100,09
3	Nilai Tukar PemBudi Daya Ikan	103,25	103,03	99,79
4	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	86	89,16	103,67

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Secara rinci analisis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

SP.1. Meningkatnya Produksi Perikanan Budi Daya yang Berkelanjutan

Sasaran Program pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah Meningkatnya produksi Perikanan Budi Daya yang berkelanjutan dengan indikator kinerja :

IK.1 Produksi Perikanan Budi Daya

Realisasi				2025			Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
5,59	5,54	5,61	5,90	6,75	6,76	100,15	8,52	79,34

Satuan (Juta Ton)

Capaian produksi perikanan budi daya pada tahun 2025 sebesar 6,76 juta ton dan jika dibandingkan dengan target pada tahun 2025 yakni sebesar 6,75 juta ton maka capaian produksi perikanan budi daya adalah sebesar 100,15 persen. Produksi perikanan budi daya tahun 2025 naik jika dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2024 sebesar 14,47 %. Jika dilihat selama

periode 2021 – 2025, volume produksi perikanan budi daya selama waktu tersebut mengalami sedikit kenaikan dengan rata-rata per tahunnya naik sebesar 3,29 %.

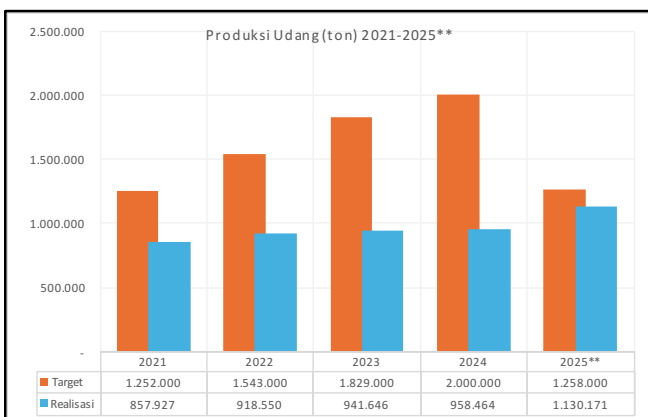
Tabel 2. Perkembangan produksi perikanan budi daya Tahun 2021-2025 (Ton)

KOMODITAS	2021	2022	2023	2024	2025**	KENAIKAN RATA-RATA
UDANG	857.928	918.550	941.647	958.464	1.130.171	7,32
BANDENG	825.858	779.706	772.709	792.864	948.784	3,95
KERAPU	7.799	12.240	11.352	16.063	16.062	22,80
KAKAP	9.663	8.642	7.746	10.563	8.768	-0,39
MAS	634.757	508.725	483.366	523.796	580.919	-1,39
NILA	1.384.604	1.356.655	1.368.543	1.563.328	1.679.393	5,13
LELE	1.335.217	1.101.625	1.136.619	1.157.756	1.212.627	-1,93
PATIN	385.866	340.444	348.379	381.969	456.311	4,92
GURAMI	177.774	159.572	153.940	156.309	200.470	4,01
LAINNYA	388.816	355.633	383.718	339.898	524.138	10,54
Grand Total	6.008.281	5.541.791	5.608.017	5.901.009	6.757.645	3,29

Sumber data Portaldata.KKP.go.id

**angka sangat sementara

i. Udang



Gambar 5. Perkembangan Produksi Udang 2021-2025**

Perkembangan produksi udang nasional tahun 2021 - 2025 mengalami peningkatan dengan peningkatan rata-rata sebesar 7,32% per tahunnya. Pada tahun 2025 produksi udang mencapai target sebesar 89,84%, tidak tercapainya target produksi udang ini terutama disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan lahan untuk budi daya udang terkait dengan tata ruang yang masih tumpang tindih dan masih ada efek berkurangnya pasar ekspor udang Indonesia karena ada penolakan

komoditas ekspor udang di pasar USA, ditambah lagi terjadinya bencana alam di beberapa sentra produksi udang seperti di Aceh dan Sumatera Utara, akan tetapi produksi masih tetap meningkat dibandingkan tahun 2024 seiring dengan mulai bergulirnya program terobosan terhadap budi daya udang yang diinisiasi oleh Ditjen Perikanan Budi Daya (DJPB). Ditjen Perikanan Budi Daya telah dan terus mengambil langkah nyata dalam upaya peningkatan volume dan nilai produksi udang adalah (i) Rehabilitasi saluran dan infrastruktur tambak untuk mengembalikan performance tambak sesuai standar kelayakan teknis; (ii) Bantuan sarana budi daya udang yang merupakan stimulus bagi pembudi daya untuk meningkatkan usaha budi daya udang; (iii) Melakukan berbagai

kerjasama lintas sektoral dan stakeholders lain untuk mempermudah akses baik infrastruktur, sarana dan prasarana budi daya, serta akses pasar dan permodalan; (iv) Pengembangan pola budi daya berbasis manajemen kawasan/klaster; (v) Penguatan kelembagaan dan pengembangan kemitraan usaha; (vi) Peningkatan input teknologi budi daya yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (vii) Pendampingan teknologi secara intensif dan massive terhadap pelaku usaha budi daya udang.

ii. Bandeng



Gambar 6. Perkembangan produksi Bandeng 2021-2025**

Perkembangan produksi bandeng dari tahun 2021 - 2025 mengalami kenaikan sebesar 3,95%. Sempat terjadi penurunan pada tahun 2020 s.d 2022 karena pandemic dan meningkat kembali pada tahun 2024. Pada tahun 2025 produksi tercapai sebesar 100,29% ini disebabkan karena berbagai teknologi diversifikasi olahan bandeng yang menyebabkan minat masyarakat akan produk bandeng semakin tinggi. Yang menyebabkan minat pembudidaya untuk meningkatkan

produksi juga semakin baik dan semakin banyak pembudidaya yang tertarik untuk membudidayakan ikan bandeng.

Untuk kembali dapat meningkatkan produksi bandeng dan mencapai target produksinya, upaya yang telah dilakukan Ditjen Perikanan Budi Daya dengan beberapa langkah kebijakan strategis yang akan dilakukan antara lain : a) Membentuk model penerapan industrialisasi bandeng sebagai upaya dalam rangka menumbuhkan kembangkan usaha budi daya bandeng pada kawasan-kawasan potensial; b) Pengembangan broodstock bandeng dalam upaya pemenuhan kebutuhan benih berkualitas di sentral-sentral produksi; c) Pengembangan input teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; d) Menggandeng Asosiasi Pelaku Usaha Bandeng Indonesia (ASPUBI), yang dalam hal ini diposisikan sebagai partner Pemerintah khususnya dalam mendorong implementasi kebijakan industrialisasi bandeng. Langkah-langkah di atas akan terus di dorong sehingga capaian volume dan nilai produksi periode 2025-2029 akan mampu tercapai.

iii. Kerapu

Trend produksi ikan kerapu dari tahun 2021 - 2025 menunjukkan kinerja yang cukup positif. Hal ini bisa dilihat dari trend produksinya yang cenderung naik dari tahun 2021. Produksi ikan kerapu pada tahun 2025 meningkat dari tahun 2021 mencapai 16.062 ton atau tercapai targetnya sebesar 80,31 % dari target sebesar 20.000 ton. Tidak tercapainya target produksi ditahun 2025

disebabkan karena terbatasnya stok benih untuk pembesaran ikan kerapu di KJA Laut, selama ini stok benih masih banyak diperoleh dari hasil tangkapan nelayan yang di besarkan di KJA Laut. Untuk lebih memacu peningkatan produksi kerapu ini berbagai upaya telah dilakukan oleh DJPB kerapu yang bermutu di UPT dan unit pembenihan skala rumah tangga (HSRT); dan (ii) Adanya kebijakan program bantuan KJA budi daya ikan kerapu di beberapa daerah potensial yang memicu perkembangan kawasan budi daya kerapu di beberapa daerah potensial.



Gambar 7. Perkembangan Produksi Kerapu 2021-2025**

iv. Kakap



Gambar 8. Perkembangan Poduksi Kakap 2021-2025

Ketidaktercapaian target produksi ini karena ketersediaan benih ikan kakap yang terbatas juga penyebabnya. Selain itu semakin banyak masyarakat yang mengusahakan tambak intensif sehingga lahan tambak tradisional yang hasil sampingannya berupa ikan kakap semakin sedikit dan secara tidak langsung berdampak pada produksi ikan kakap itu sendiri. Untuk lebih meningkatkan produksi ikan kakap DJPB telah mengalokasikan bantuan berupa KJA laut dan pengembangan benih kakap di beberapa UPT pusat untuk mendukung Budi Daya kakap di KJA laut.

v. Ikan Mas

Produksi ikan mas selama tahun 2021 - 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,39% dan target produksi belum mencapai target. Belum tercapainya target produksi ikan mas terutama disebabkan merebaknya berbagai penyakit ikan yang menyebabkan tingkat produktifitas menurun, sebagai contoh virus KHV yang masih belum bisa hilang 100% di sentra budi daya ikan mas.



Gambar 9. Perkembangan Produksi Ikan Mas 2021-2025

yang secara langsung mendorong peningkatan efisiensi produksi, diantaranya : (i) Intensifikasi melalui pengembangan teknologi baik budi daya maupun aspek nutrisi (pakan) yang berkualitas berbasis bahan baku lokal; (ii) Pengembangan kapasitas usaha dengan dukungan penguatan modal bagi usaha skala kecil melalui penguatan kemitraan usaha; (iii) Perluasan akses pasar dan peningkatan nilai tambah; dan (iv) pengembangan budi daya ikan dikombinasikan dengan lahan padi atau minapadi

vi. Nila



Gambar 10. Perkembangan Produksi Ikan Nila 2021-2025**

sedikit duri seperti ikan nila dan ikan nila bisa diolah menjadi makanan siap saji seperti fillet ikan dan nugget ikan, yang turut mendorong konsumsi ikan nila dan secara tidak langsung menarik minat untuk melakukan pembudidayaan ikan nila selain itu sudah mulai operasionalnya Kawasan Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) juga menjadi salah satu faktor tercapainya produksi ikan nila.

Rencana aksi dalam upaya pencapaian kinerja antara lain melalui (i) Pengembangan gerakan minapadi, (ii) Pengembangan budi daya ikan nila melalui intensifikasi dengan Bioflok dan *Running Water* dan budi daya ikan nila berbasis Kawasan seperti di BLU Karawang; (iii) Mendorong pemanfaatan bahan baku lokal untuk pembuatan pakan ikan secara mandiri yang berkualitas; (iv)

Pencapaian target produksi ikan mas pada beberapa tahun belakangan ini dan tahun-tahun ke depan mengalami tantangan dengan adanya kebijakan *zero KJA* secara nyata telah memberikan pengaruh negative terhadap pertumbuhan produksi ikan mas. Namun Ditjen perikanan Budi Daya tetap berupaya untuk memenuhi target yang telah ditetapkan dan dalam upaya pencapaian target volume produksi tersebut, maka dilakukan upaya-upaya

Produksi ikan nila dari tahun 2021 - 2025 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan rata-rata kenaikan 5,13%. Capaian pada tahun 2025 mencapai 107,99% dari target. Terjadinya peningkatan produksi ikan, menunjukkan bahwa terjadi geliat pembudidayaan ikan nila di daerah. Tercapainya produksi ikan nila pada tahun 2025 terutama disebabkan karena pola konsumsi orang Indonesia yang cenderung menyukai ikan yang memiliki

Ekstensifikasi pada kawasan potensial melalui rencana pengembangan nila salin di eks tambak udang pantura jawa; serta (v) Penciptaan peluang pasar yang lebih luas.

vii. Lele

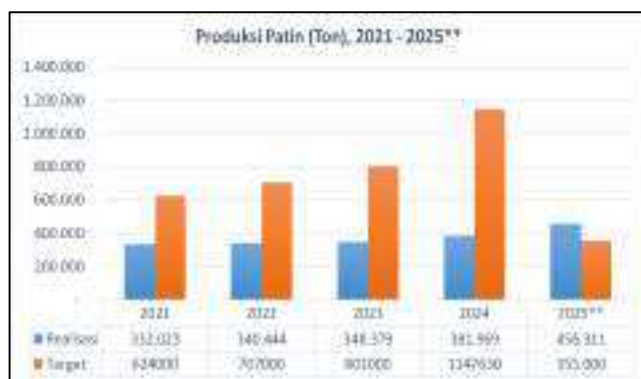


Gambar 11. Perkembangan Produksi Lele 2021-2025

Selama kurun waktu tahun 2021 - 2025 produksi ikan lele menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan peningkatan produksi rata-rata sebesar 1,93%. Produksi ikan lele selama lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Namun di tahun 2021 produksi mulai meningkat mengingat pandemi sudah beralih status menjadi endemi dengan semakin banyak penduduk Indonesia yang mendapat dosis vaksin ketiga, ikan lele yang bisa dibudidayakan dengan mudah ini memiliki

satu kekuatan yaitu, untuk memenuhi kebutuhan lokal dengan adanya hasil positif selama beberapa tahun terakhir, maka untuk mempertahankan pencapaian produksi lele di tahun selanjutnya, beberapa kegiatan yang perlu diteruskan adalah sebagai berikut: (i) Pengembangan teknologi budi daya secara intensifikasi dengan bioflok untuk efisiensi pakan; (ii) Penggunaan teknologi budi daya ikan lele dengan terpal sebagai upaya efisiensi pemanfaatan lahan; (iii) Efisiensi pakan melalui bantuan gerakan pakan mandiri; dan (iv) pembangunan pabrik pakan guna memenuhi kebutuhan pakan yang berkualitas dan terjangkau.

viii. Patin



Gambar 12. Perkembangan Produksi Patin 2021-2025

Produksi ikan patin dari tahun 2021-2025 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 4,92%. Volume produksi pada tahun 2025 tercapai sebesar 128,54% dibandingkan dengan target tahunan. Tercapainya produksi ikan patin di tahun 2025 antara lain disebabkan karena penyesuaian target yang dilakukan mulai tahun 2025, mengingat ikan patin belum merupakan ikan yang menjadi preferensi

untuk seluruh Masyarakat Indonesia tetapi hanya di beberapa daerah seperti

Kalimantan dan Sumatera bagian Selatan sementara itu di pulau jawa yang merupakan potensi untuk pemasaran penduduknya masih kurang menyukai ikan patin. Disisi lain permasalahan tingginya biaya produksi sebagai akibat dari tingginya harga pakan sudah mulai bisa diimbangi dengan penggunaan pakan buatan sendiri seperti gilingan ikan rucah dan program pakan mandiri

dari pemerintah. Oleh karena itu untuk lebih mendorong pengembangan budi daya ikan patin melalui kerjasama sinergi, baik lintas sektoral, swasta maupun stakeholders lain, untuk menjamin ketercapaian produksi ikan patin di tahun kedepan. Kerjasama tersebut diarahkan dalam rangka :

- (i) Penciptaan peluang pasar yang lebih luas terutama pasar luar negeri seperti pada negara-negara yang banyak tenaga kerja indonesianya seperti arab Saudi dan daerah timur tengah lainnya;
- (ii) Pengembangan input teknologi yang aplikatif, efektif dan efisien;
- (iii) Pengembangan kawasan budi daya ikan patin secara terintegrasi, serta
- (iv) Peningkatan nilai tambah produk menjadi hal mutlak dan terus dilakukan yaitu melalui pengembangan diversifikasi produk olahan berbahan baku ikan patin dan pengembangan unit pengolahan ikan patin. Melalui upaya diatas, maka secara langsung akan mampu memberikan jaminan terhadap jalannya siklus bisnis yang positif dan berkesinambungan;
- (v) Mendorong peningkatan konsumsi ikan patin terutama daerah di luar Sumatera dan Kalimantan.

ix. Gurame



Gambar 13. Perkembangan Produksi Gurame 2021-2025**

Produksi gurame tahun 2021 - 2025 menunjukkan kinerja yang positif, dengan kenaikan rata-rata per tahun sebesar 4,01%. Angka capaian produksi tahun 2025 belum mencapai target produksi dengan capaian sebesar 95,01%. Namun produksinya mengalami peningkatan pada tahun 2025 ini. meningkatnya produksi ini terutama disebabkan karena nilai ekonomis ikan gurame yang cukup tinggi dan pemasarannya yang masih cukup terbuka. Produksi gurame masih

didominasi pada beberapa sentra-sentra produksi yang sudah ada, sedangkan disisi lain kapasitas usaha yang dijalankan tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan, hal ini disebabkan karena proses produksi budi daya yang cukup lama dan semakin sedikitnya ketersediaan pakan alami untuk gurame yang disebabkan karena banyaknya alih fungsi lahan, karena gurame merupakan salah satu ikan yang mengkonsumsi pakan alternatif seperti daun talas ataupun pakan alternatif lainnya.

Pengembangan pola usaha berbasis segmentasi merupakan langkah yang tepat karena secara nyata mampu memberikan keuntungan yang cukup signifikan. Percepatan pengembangan kawasan melalui pendekatan pola segmentasi usaha diharapkan akan mampu menarik minat masyarakat untuk terjun melakukan usaha budi daya gurame.

Pencapaian volume produksi perikanan budi daya secara keseluruhan untuk semua komoditas utama didukung oleh kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan produksi perikanan budi daya, dengan fokus pada komoditas udang, bandeng, rumput laut dan ikan patin. Kegiatan utama dalam industrialisasi, khususnya untuk usaha udang dan bandeng adalah bantuan sarana, perbaikan saluran tersier, perbaikan tambak, fasilitasi sistem kemitraan serta pembinaan dan pendampingan teknis budi daya
- Pengembangan sistem perbenihan melalui penguatan *broodstock center* : i) Pelepasan jenis dan/atau varietas ikan unggul bekerjasama dengan unit kerja lainnya, yaitu telah dilakukan pelepasan sebanyak 10 varietas induk unggul (Udang vaname “*Global Gen*”, Ikan Batak “*Tor Soro*”, Nila Nirwana II, Nila Sultana, Nila Srikandi, Kerapu Cantang, Nila Anjani, Nila Merah Nilasa, Nila Jantan Pandu dan Nila Betina Kunti, Lele Sangkuriang dua, Udang Windu Domestikasi); ii) Gerakan Penggunaan Induk Ikan Unggul (GAUL); iii) Penyusunan regulasi dan perbanyak protokol induk ikan unggul; serta iv) Pengembangan jaringan informasi dan distribusi ikan.
- Pengembangan sistem produksi melalui (i) Pengembangan input teknologi yang sesuai standar (teknologi anjuran), aplikatif, efektif dan efisien berbasis wawasan lingkungan; (ii) Meningkatkan daya saing produk hasil produksi budi daya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sertifikasi Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB); (iii) Pengembangan percontohan usaha perikanan budi daya sebagai upaya dalam mensosialisasikan model pengelolaan budi daya berkelanjutan; (iv) Pengembangan mina padi sebagai bagian dari upaya mendapatkan nilai tambah ganda.
- Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan melalui kegiatan terobosan utama: (i) Normalisasi saluran irigasi tambak bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum; (ii) Penataan dan rehabilitasi kawasan tambak dalam rangka Gerakan Revitalisasi Tambak; (iii) Pemberdayaan pembudidaya ikan melalui pengelolaan jaringan irigasi tambak partisipatif (PITAP) di kawasan industrialisasi; dan (vii) Pemberian bantuan sarana dan prasarana lainnya seperti KJA, ekskavator dan mesin pellet
- Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan, dengan terobosan utama adalah (i) Pengembangan *National Residu Monitoring Plan* (NRMP) yang merupakan suatu panduan/perencanaan untuk mengontrol residu obat kimia dan bahan biologis lainnya; dan (ii) Pengembangan vaksin untuk mengatasi penyakit ikan.
- Pengawasan dan Penerapan Teknologi Adaptif Perikanan Budi Daya yang dilakukan oleh 15 UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya.

Ditjen Perikanan Budi Daya mendukung program ketahanan pangan melalui peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan berprotein yang bersumber dari ikan. Selain itu program bantuan pemerintah Ditjen Perikanan Budi Daya antara lain bantuan benih, bantuan calon induk ikan sebagai salah satu kegiatan yang mendukung program pengetasan kemiskinan.

IKU 2. Produksi Rumput Laut

Realisasi				2025			Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
9,09	9,23	9,75	9,85	11,64	11,65	100,09	14,14	82,39

*Satuan juta ton

Produksi rumput laut memberikan kontribusi yang paling besar terhadap total produksi perikanan Budi Daya, dimana secara nasional produksi rumput laut memberikan *share* sebesar 63,29% terhadap produksi perikanan budi daya. Perkembangan produksi rumput laut dari tahun 2021 - 2025 menunjukkan trend yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,62%. Kenaikan ini disebabkan terutama karena beberapa sentra rumput laut mulai bangkit yang disebabkan kualitas bibit yang semakin baik sehingga tahan terhadap kondisi lingkungan dan cepat terserang penyakit, dan juga produksi bibit rumput laut kultur jaringan sudah menjangkau seluruh wilayah sentra budi daya rumput laut di Indonesia.

Tabel 3. Perkembangan Produksi Rumput Laut Tahun 2021-2025

*KOMODITAS	2021	2022	2023	2024	2025**	Kenaikan per Tahun (%)
Rumput Laut	9.092.031	9.234.268	9.753.411	9.853.604	11.654.296	6,62
Total	9.092.031	9.234.268	9.753.411	9.853.604	11.654.296	6,62

Selama 5 tahun terakhir akan tetapi rumput laut tetap sebagai penyumbang utama pada total produksi perikanan budi daya, beberapa hal yang mendasari tingginya pencapaian komoditas ini karena budi daya rumput laut mempunyai masa pemeliharaan yang cukup singkat yaitu 45 hari per siklus sehingga perputaran modal usaha dapat lebih cepat, serta cara budi daya yang mudah. Rumput laut juga cocok untuk dibudidayakan di daerah-daerah dengan curah hujan rendah yang merupakan salah satu ciri dari daerah yang masyarakat ekonominya digolongkan bawah. Keuntungan lainnya adalah modal kerja yang relatif kecil, penggunaan teknologi yang sederhana, dan peluang pasar yang masih terbuka lebar mengingat rumput laut merupakan bahan baku untuk beberapa industri, seperti *biofuel*, agar-agar, caragenan, kosmetik, obat-obatan dan lain-lain. Selain itu, pemerintah juga terus menerus melakukan upaya terobosan diantaranya adalah pengembangan industrialisasi rumput laut di sentra-sentra penghasil rumput laut, peningkatan kualitas bibit rumput laut dengan teknologi kultur jaringan melalui pembiayaan LAUTRA, pengembangan laboratorium dan sarana budi daya rumput laut, sosialisasi dan bimtek budi daya rumput laut, serta pendampingan teknis Cara Budi Daya Rumput Laut yang baik. Rumput laut Indonesia didominasi spesies *Gracilaria spp* dan *Euchema cottonii*. Namun beberapa beberapa tahun terakhir mulai berkembang komoditas *Euchema spinosum* dan *Caulerpa sp*.

IK.3. Nilai Tukar PemBudi Daya Ikan (NTPI)

Realisasi				2025			Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
102,83	104,62	104,83	102,08	103,25	103,03	99,79	104,25	98,83

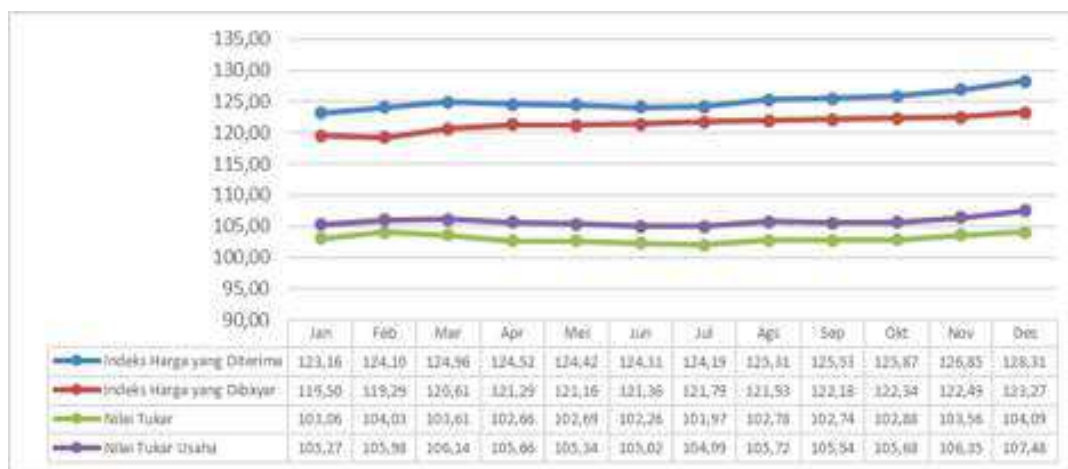
Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) merupakan salah satu indikator kinerja utama Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang berfungsi untuk mengukur daya tukar hasil usaha budi daya terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta biaya produksi. Secara teknis, NTPI adalah angka indeks yang membandingkan indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan dengan indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya.

Interpretasi nilai NTPI adalah sebagai berikut:

NTPI > 100: Pembudidaya mengalami surplus, di mana kenaikan harga produksi lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga konsumsi.

NTPI = 100: Pembudidaya berada pada titik impas, di mana kenaikan harga produksi setara dengan kenaikan harga konsumsi.

NTPI < 100: Pembudidaya mengalami defisit, di mana kenaikan harga produksi lebih rendah daripada kenaikan harga konsumsi.



Gambar 14. Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Bulan Januari - Desember Tahun 2025

Selama periode Januari hingga Desember 2025, rata-rata NTPI tercatat sebesar 103,03. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan secara umum berada dalam kondisi baik karena nilai indeks konsisten di atas 100.

Tabel 4. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan Januari - Desember Tahun 2025

Komponen NTPI		Bulan												Rata-rata	Kenaikan Rata-rata (%)
		Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des		
	Nilai Tukar	103,06	104,03	103,61	102,66	102,69	102,26	101,97	102,78	102,74	102,88	103,56	104,09	103,03	0,09
	Nilai Tukar Usaha	105,27	105,98	106,14	105,66	105,34	105,02	104,99	105,72	105,54	105,68	106,35	107,48	105,76	0,19
a	Indeks Harga Diterima (It)	123,16	124,1	124,96	124,52	124,42	124,11	124,19	125,31	125,53	125,87	126,85	128,31	125,11	0,37
	- Budi daya air tawar	117,66	118,16	118,74	118,81	118,33	117,8	116,98	117,1	117,21	117	117,67	119,27	117,89	0,13
	- Budi daya laut	119,02	119,24	119,23	118,19	117,97	118,4	119,04	119,41	119,52	122,08	122,51	122,64	119,77	0,27
	- Budi daya Air Payau	123,72	124,85	125,9	124,97	125,55	125,4	126,02	127,53	127,73	128,08	129,08	130,03	126,57	0,45
	b Indeks harga Dibayar	119,5	119,29	120,61	121,29	121,16	121,36	121,79	121,93	122,18	122,34	122,49	123,27	121,43	0,28
	- Indeks KRT	122,28	121,6	123,73	125,04	124,44	124,85	125,55	125,49	125,58	125,77	125,92	127,48	124,81	0,38
	- Indeks BPPM	116,99	117,1	117,73	117,85	118,11	118,17	118,29	118,53	118,94	119,1	119,28	119,38	118,29	0,18

Rata-rata indeks harga yang diterima (It) pembudidaya selama tahun 2025 adalah 125,11, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,37% per bulan. Berdasarkan subsektornya, kenaikan harga tertinggi terjadi pada: Budi Daya Air Payau: Naik 0,45%; Budi Daya Laut: Naik 0,27%; dan Budi Daya Air Tawar: Naik 0,13%.

Peningkatan indeks harga ini didorong oleh membaiknya tingkat permintaan ikan, baik untuk pasar ekspor maupun konsumsi dalam negeri.

Tabel 5 Indeks Konsumsi Rumah Tangga Januari - Desember Tahun 2025

Komponen RTPI	Bulan												Rata-rata	Kenaikan Rata-rata (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Des		
Konsumsi Rumah Tangga (KRT)	122,28	123,8	123,79	125,04	126,46	126,81	125,55	125,49	125,58	125,77	125,82	127,48	124,81	0,38
1 Makanan, Minuman Dan Tembakau	128,88	128,3	130,35	130,96	131,8	130,51	131,53	131,38	131,43	131,55	131,72	134,29	130,87	0,38
2 Pulutan Dan Akrilak	126,23	124,41	126,12	126,48	126,54	125,77	127,51	127,39	127,13	127,41	127,5	127,68	126,58	0,25
3 Perumahan, Air, Listrik Dan Bahan Bakar Rumah Tangga	85,99	85,93	100,59	110,11	130,13	130,38	130,44	110,52	110,57	130,63	130,85	110,8	106,71	1,41
4 Perlengkapan, Peralatan Dan Perawatan Rutin Rumah Tangga	129,12	129,41	128,85	129,05	129,12	129,35	130,49	129,82	130,15	130,9	121,97	123,21	126,15	0,25
5 Kesehatan	127,29	127,53	128,02	128,24	128,62	128,72	128,86	128,89	129,09	129,1	129,42	129,49	128,64	0,36
6 Transportasi	120,18	120,74	120,84	120,15	120,53	120,25	120,77	120,29	120,12	120,46	120,17	120,67	120,6	0,11
7 Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	109,68	109,68	109,71	109,81	109,88	109,95	109,93	109,97	109,69	109,03	109,03	109,01	109,15	-0,06
8 Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	117,34	117,38	117,1	117,85	117,98	118,2	118,38	118,35	118,4	119,46	119,45	119,47	118,56	0,26
9 Pendidikan	105,03	105,91	105,95	105,96	105,98	105,94	106,25	106,52	106,33	106,53	106,53	106,53	106,13	0,02
10 Perawatan Makanan Dan Minuman (Restoran)	116,7	116,86	117,32	117,59	117,78	117,81	118,35	118,36	118,61	118,78	118,83	118,87	118	0,08
11 Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	126,03	127,01	128,21	130,02	130,34	130,77	131,04	131,35	132,39	134,6	135,62	136,38	131,15	0,72

Indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya terdiri dari dua komponen utama, yaitu Indeks Konsumsi Rumah Tangga (KRT) dan Indeks Biaya Produksi serta Penambahan Barang Modal (BPPBM). Rata-rata Ib selama tahun 2025 adalah 121,43, dengan kenaikan rata-rata 0,28% per bulan.

Konsumsi Rumah Tangga (KRT) memiliki rata-rata indeks 124,81 dengan kenaikan 0,38% per bulan. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (0,72%) serta Makanan, Minuman, dan Tembakau.

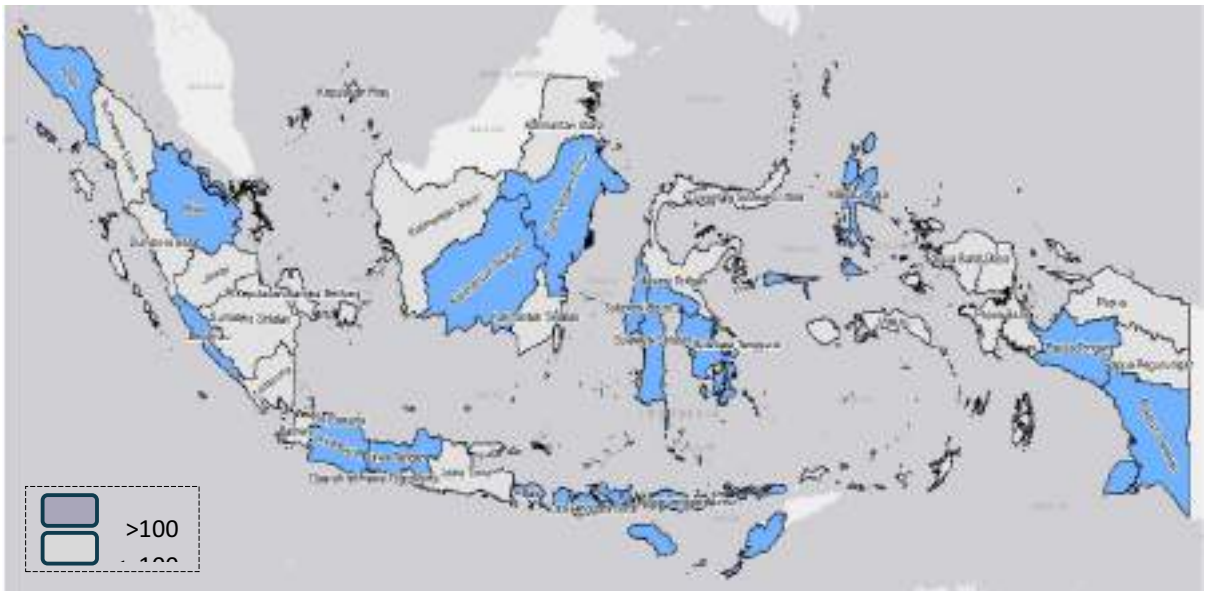
Tabel 6. Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal Januari - Desember Tahun 2025

Komponen BPPBM	Indeks Harga												Rata-rata	Kenaikan Rata-rata (%)
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agst	Sept	Oktr	Nov	Des		
BPPBM	116,89	117,3	117,79	117,85	118,11	118,17	118,29	118,59	118,94	119,1	119,28	119,38	118,29	0,18
1 Bibit/Benih	116,79	117,12	117,77	117,66	117,68	118,15	118,13	118,31	118,83	118,96	119,16	119,16	118,13	0,18
2 Pakan, Obat-Obatan, Dan Pakan Ikan	120,36	120,35	121	121,09	121,98	121,41	121,68	122,19	122,41	122,69	122,86	122,93	121,66	0,22
3 Sewa Dan Pengalihan Lainnya	105,01	105,16	104,54	105,15	105,53	105,25	104,37	104,45	104,9	105,18	105,35	105,56	104,89	0,05
4 Transportasi Dan Komunikasi	121,07	121,59	122,9	122,59	122,48	122,25	122,65	122,54	122,58	122,73	122,91	123,01	122,68	0,13
5 Barang Modal	118,17	118,8	119,07	119,18	119,31	119,37	119,43	119,45	119,7	119,8	119,91	119,96	119,39	0,11
6 Upah Buruh	115,25	115,5	115,91	116,17	116,51	116,57	116,66	116,86	117,13	117,16	117,33	117,58	116,54	0,18

Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) memiliki rata-rata indeks 118,29 dengan kenaikan 0,18% per bulan. Kenaikan biaya ini dipicu oleh:

- Kenaikan harga bahan baku tepung ikan untuk pakan.
- Penyesuaian Upah Minimum Regional (UMR) bagi buruh.
- Kenaikan harga bibit/benih ikan di pasaran.

Berdasarkan wilayahnya selama periode Januari – Desember tahun 2025 terdapat 17 provinsi yang rata-rata indeks NTPI-nya di atas 100, yaitu Aceh, Riau, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Selatan, dan Papua Tengah. NTPI rata-rata tertinggi pada Januari - Desember tahun 2025 ini adalah provinsi Sulawesi Tenggara dengan nilai sebesar 111,79 dan NTPI terendah provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 88,32.



Gambar 15. Peta Nilai Tukar Pembudidaya Ikan bulan Januari - Desember Tahun 2025

Untuk menjaga stabilitas NTPI di masa mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Menjaga Produktivitas dan Harga
Memastikan produktivitas pembudidaya tetap stabil dan menjaga harga komoditas di tingkat produsen agar tidak mengalami penurunan.
2. Intervensi Biaya Produksi
Ditjen Perikanan Budi Daya perlu melakukan intervensi pada komponen biaya yang paling berpengaruh, khususnya pengadaan bibit/benih dan pakan.
3. Dukungan Pembudidaya Kecil
Pemberian bantuan pupuk untuk meningkatkan pakan alami (*plankton*) melalui teknologi sederhana.
4. Optimalisasi Distribusi
Memperbaiki sistem distribusi hasil produksi, baik untuk benih maupun ikan konsumsi, guna memastikan efisiensi pasar.

SP.2. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

IKU 4. Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Realisasi				2025			Renstra 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	%	Target	%
-	-	-	-	86	89,16	103,67	86	102,91

Indikator kinerja Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya merupakan indikator kinerja mandatori Tahun 2025 yang ditetapkan untuk dicantumkan pada Rencana Strategis KKP 2025-2029 dan Rencana Kerja KKP Tahun 2025 berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan, Nomor: 457/ SJ.1/RC.610/II/2025 Tanggal : 6 Februari 2025 tentang Indikator Kinerja Mandatori Tahun 2025.

Capaian indikator ini diukur dari 12 indikator komponen pembentuk implementasi kebijakan RB di level Unit Eselon I yang diampu oleh Level II Sekretariat. Indikator tersebut yaitu :

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya;
2. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya;
3. Nilai pembangunan integritas Ditjen Perikanan Budi Daya ;
4. Persentase penyelesaian proses bisnis dan SOP Ditjen Perikanan Budi Daya;
5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya
6. Persentase penyelesaian program penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya
7. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya
8. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya
9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya
10. Nilai maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya
11. Nilai pengawasan kearsipan internal lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya
12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya

Capaian nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025 sebesar 89,16 (Kategori A/Memuaskan) sebagaimana Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Nomor 140/SJ.3/OT.720/I/2026, Tanggal : 23 Januari 2026 tentang Perbaikan Capaian Indikator Kinerja Mandatori Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025.

Capaian Ditjen Perikanan Budi Daya ini menempati peringkat ke 5 dari 10 Eselon I yang ada di level 1 lingkup KKP. Ditingkat nasional, capaian ini juga lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai rata-rata Indeks di Tingkat K/L dengan jumlah populasi sebanyak 82 KL adalah sebesar 82,98 berdasarkan hasil pengumuman pada Rapat Koordinasi Kebijakan Reformasi Birokrasi 2025-2029 dan Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 yang dilaksanakan di di *Holding Room* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3.3 Efisiensi

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan.

Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya telah melakukan upaya-upaya optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan *resource* SDM dan waktu kerja. Sumber efisiensi anggaran terutama berasal dari efisiensi pelaksanaan anggaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Di samping itu, juga telah melakukan langkah streamlining pertemuan atau sidang ke UPT melalui fasilitas *video conference*, serta melakukan langkah efisiensi terkait penghematan dalam pelaksanaan kegiatan, dan pengurangan biaya perjalanan dinas. Pada Tahun 2025 efisiensi anggaran perjalanan dinas Ditjen Perikanan Budi Daya sebesar Rp34,85 miliar dibandingkan dengan Anggaran Perjalanan Dinas Tahun 2024.

Tabel 7. Perbandingan Efisiensi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Akun	Jenis Belanja	2024	2025	Penurunan (Rp)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72.769.087.000	56.552.428.000	16.216.659.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.149.083.000	531.273.000	1.617.810.000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.517.328.000	1.347.211.000	5.170.117.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18.941.026.000	7.090.124.000	11.850.902.000
Jumlah		103.856.324.000	73.025.322.000	34.855.488.000

Efisiensi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025 ini mencapai 9,75%.

No	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran Program		Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran	%NPSP x Anggaran Per Sasaran		% Efisiensi Anggaran	
1	2	3		4	5	6	7=3x4		8=(7-5)	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Perikanan Budi	99,95%	99,95%	817.071.679.000	751.220.770.883	91,94%	816.663.143.161	816.663.143.161	65.442.372.278	65.442.372.278
6	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	103,67%	107,76%	319.866.771.000	317.409.704.573	99,23%	331.605.881.496	331.605.881.496	14.196.176.923	14.196.176.923
Jumlah				1.018.205.687.000	816.747.196.652	80,21%	1.148.269.024.656	1.148.269.024.656	79.638.549.200	79.638.549.200
							% Efisiensi (8/4)	% Efisiensi (8/4)	9,75%	9,75%

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN 2025 pada Ditjen Perikanan Budi Daya adalah sebesar Rp1.418.962.933.000,- Berdasarkan data dari *Online Monitoring* Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) dengan pagu efektif setelah blokir sebesar Rp1.130.583.925.000,- sampai dengan triwulan IV tahun 2025, realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya telah tercapai sebesar Rp1.016.589.206.678,- (89,92% dari pagu efektif), menurun secara nilai dan persentase bila dibandingkan tahun 2024 yaitu sebesar 8,45%, akan tetapi bila realisasi anggaran dilihat secara rata-rata sejak tahun 2021 hingga 2025 sebesar 96,94%. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2021 – 2025

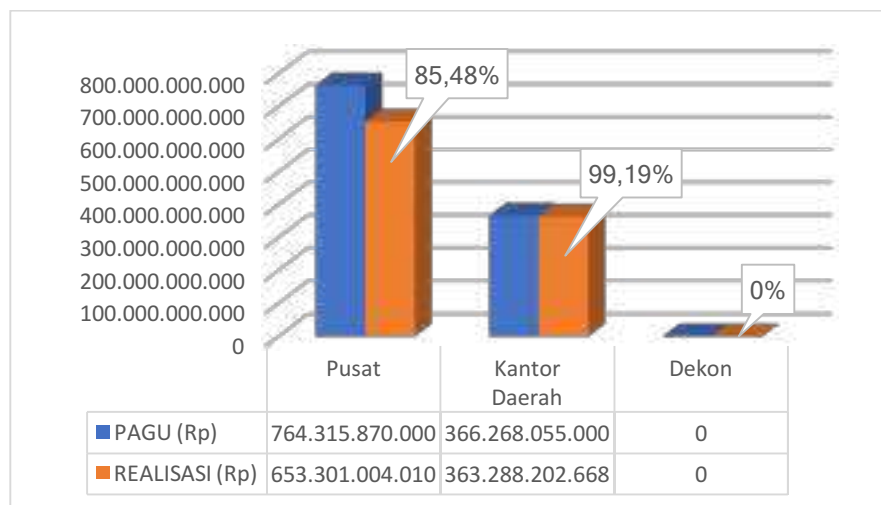
Tahun Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi(Rp)	(%)	Rata Rata Realisasi (%)
2025	1.130.583.925.000,-	1.016.589.206.678,-	89,92	96,94
2024	1.004.234.704.000,-	987.841.797.093,-	98,37	
2023	1.100.237.305.000,-	1.087.136.906.277,-	98,81	
2022	953.833.625.000,-	944.650.891.776,-	99,04	
2021	782.065.357.000,-	770.399.106.401,-	98,55	

Pembagian alokasi pagu anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025 tersebut menurut jenis belanja yaitu : (i) Belanja Pegawai sebesar Rp195.824.149.000,-; (ii) Belanja Barang sebesar Rp529.389.536.000; dan (iii) Belanja Modal sebesar Rp405.370.240.000,-.

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya per Jenis Belanja Tahun 2021 sampai dengan 2025

Tahun	Pegawai			Barang			Modal			Total		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
2021	187.162.901.000	183.126.257.770	97,8	494.147.910.000	487.048.948.366	98,6	100.754.546.000	100.223.900.265	99,47	782.065.357.000	770.399.106.401	98,51
2022	187.063.301.000	180.690.614.282	96,6	560.777.298.000	553.682.203.073	98,7	210.993.026.000	210.278.074.421	99,66	953.833.625.000	944.650.891.766	99,04
2023	168.653.178.000	165.462.819.652	98,1	807.237.488.000	797.757.879.989	98,8	124.346.639.000	123.916.206.636	99,65	1.100.237.305.000	1.087.136.906.277	98,81
2024	186.783.785.000	185.828.924.729	99,5	720.634.092.000	708.117.698.064	98,3	96.816.827.000	93.895.174.300	96,98	1.004.234.704.000	987.841.797.093	98,37
2025	195.824.149.000	194.013.819.169	99,1	529.389.536.000	439.929.407.883	83,1	405.370.240.000	382.645.979.626	94,39	1.130.583.925.000	1.016.589.206.678	89,92

Prosentase anggaran belanja Ditjen Perikanan Budi Daya tahun 2025 berdasarkan tabel di atas cukup proporsional karena didominasi oleh Belanja Pegawai dan Belanja Modal, sedangkan untuk Belanja Barang cukup rendah karena mengalami penurunan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024.



Gambar 16. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran terbesar yaitu pada Satker UPT (99,19%), sedangkan yang terendah yaitu pada satker Tugas Pembantuan Provinsi (0%) sebagaimana berikut

1. Satker Pusat

Realisasi anggaran pada satker Pusat sebesar 85,48%, dengan adanya aturan satu dipa maka satker pusat seluruhnya tergabung dalam satu satker.

2. Satker UPT

Realisasi anggaran pada satker UPT keseluruhan sebesar 99,19%, dengan capaian terbesar terdapat pada Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee 99,99% dan terendah pada Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar 97,99%.

3. Satker Tugas Pembantuan Provinsi

Tahun 2025 kegiatan untuk Satker Tugas Pembantuan Provinsi mengalami Efisiensi anggaran sehingga seluruh anggaran untuk Satker Tugas Pembantuan dialihkan untuk pelaksanaan kegiatan prioritas Presiden.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya pada periode tahun bersangkutan dan merupakan capaian awal untuk periode RPJMN 2025-2029.

Secara umum, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang diperjanjikan, sebagian besar telah tercapai sesuai target yang ditetapkan, dengan capaian NKO sebesar 101,81 %.

Upaya percepatan pengembangan Perikanan Budi Daya dengan mempertimbangkan berbagai tantangan yang harus dihadapi, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup aspek ekologi, teknis, sosial-ekonomi, kelembagaan, serta regulasi. Disamping itu, sistem produksi dan penanganan pasca panen serta pengolahan harus mempertimbangkan kebutuhan pasar. Market global saat ini sangat memperhatikan keamanan pangan, termasuk *traceability* produk, serta yang sekarang menjadi perhatian juga adalah keberlanjutan dan kegiatan Budi Daya ramah yang lingkungan, termasuk pada proses produksi budi daya (Rimmer, 2010). Berdasarkan identifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, berikut strategi dan rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan maupun implementasi program:

1. Penerapan praktik budi daya ramah lingkungan seperti *Integrated Multi-Trophic Aquaculture* (IMTA), penggunaan pakan berkualitas, dan pengendalian limbah kegiatan budi daya. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas ekosistem dan mengurangi risiko degradasi lingkungan.
2. Pembangunan dan modernisasi sarana produksi, termasuk penggunaan Keramba Jaring Apung (KJA) berteknologi tinggi seperti KJA *High Density Polyethylene* (HDPE), yang lebih tahan terhadap gelombang dan arus.
3. Peningkatan kompetensi pembudidaya melalui pelatihan teknis yang terstandar.
4. Penguatan kelembagaan pembudidaya, termasuk pembentukan kelompok usaha bersama, koperasi, dan kemitraan dengan sektor swasta. Kelembagaan yang kuat akan meningkatkan akses pembudidaya terhadap modal, pasar, dan teknologi.
5. Penyediaan skema pembiayaan khusus seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perikanan, pembiayaan berbasis Badan Layana Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP), dan asuransi budi daya untuk mengurangi risiko kerugian akibat cuaca dan penyakit.
6. Peningkatan standar mutu produk, termasuk penerapan praktik budi daya baik (*Good Aquaculture Practices*), dan penerapan sistem ketertelusuran (*traceability*) untuk memenuhi persyaratan pasar global.

Implementasi strategi-strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan daya saing sektor perikanan budi daya, sehingga mampu memberikan

kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi maritim Indonesia

Lampiran 2. Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2025


KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

Dalam rangka meningkatkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haera Rahayu**
Jabatan : **Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya**
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**
Jabatan : **Menteri Kelautan dan Perikanan**
Selaku atasan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan menjabarkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diberikan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengidentifikasi tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA Menteri Kelautan dan Perikanan  Sakti Wahyu Trenggono	PIHAK PERTAMA Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya  Tb. Haera Rahayu
--	--

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR BUDAYA PROGRAM	TARGET
1. Meningkatkan Produksi Perikanan Budi Daya Secara Berkelanjutan	1. Produksi Perikanan Budi Daya (Rp) (juta Rp)	8,75
	2. Produksi Perikanan Budi Daya (Rumpi Laut) (juta Rp)	11,64
	3. Nilai Tambah Pembenihan Ikan (NTPi) (Rp)	10,25
2. Tata Kelola Perikanan yang efektif, efisien dan akuntabel di lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya	4. Nilai Implementasi-Ketercapaian Sistem Regulasi Ditjen Perikanan Budi Daya (Rp)	80

Data Anggaran :

NO.	PROGRAM/KELOMPOK	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penguatan Daya Saing dan Keberlanjutan	1.000.000.000.000
a.	Penguatan Perikanan Budi Daya Rumpi Laut	
b.	Penguatan Perikanan Budi Daya Rumpi Laut	
c.	Penguatan Perikanan Budi Daya Rumpi Laut	
d.	Penguatan Perikanan Budi Daya Rumpi Laut	
2.	Program Penguatan Keberlanjutan	100.000.000.000
Total Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2025		1.100.000.000.000

Jakarta, 2 Desember 2025

PIHAK KEDUA Menteri Kelautan dan Perikanan  Sakti Wahyu Trenggono	PIHAK PERTAMA Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya  Tb. Haera Rahayu
--	--

Lampiran 3. Surat penyampaikan capaian Indikator produksi Perikanan Budi Daya, Produksi rumput Laut dan NTPi

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

NOTA DINAS
NOMOR 106/DJPB.1/TU.2101/2026

Yth. : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Dan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Lampiran :
Hal : Prognosa IKU DJPB Tahun 2025
Tanggal : 12 Januari 2026

Sehubungan dengan proses pelaporan Indikator Kinerja Utama DJPB Tahun 2025, yang terdiri dari Produksi Ikan Air Tawar, Produksi Ikan Air Payau, Produksi Ikan Air Laut, Produksi Rumput Laut dan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi), maka kami sampaikan prognosa IKU tersebut seperti tertera dalam tabel berikut.

No	Indikator Kinerja Tahun 2025	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian
1	Prognosa Produksi Ikan Air Tawar	3.917.100	4.027.251	102,81
2	Prognosa Produksi Ikan Air Payau	2.562.900	2.424.822	94,61
3	Prognosa Produksi Ikan Laut	273.000	305.572	111,93
4	Prognosa Produksi Rumput laut	11.640.000	11.654.295	100,12
5	Total Produksi	18.393.000	18.411.941	100,10
6	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	103,25	103,03	99,79

Adapun beberapa hal yang perlu disampaikan dalam penyusunan prognosa tersebut dihitung berdasarkan trend capaian produksi perikanan budi daya setiap tahunnya (data prognosa dalam satu tahun terlampir).

Demikian kami kami sampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.


Ditandatangani Secara Elektronik
Tinggal Hermawan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 4. Surat capaian Iku ilia Implementasi Reformasi dan Birokrasi

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1405/LJ.3/OT.720/2026

Yth. : 1. Kepala Biro Perencanaan
2. para Sekretaris Direktorat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Badan
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pertakutan Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi
Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025
Tanggal : 23 Januari 2026

Menyusuri note dinas Nomor 87/SJ.3/OT.720/2026, tanggal 13 Januari 2026, hal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 dan merindakan note dinas Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara terkait perubahan atas hasil pengamatan kualitas penilaian mandiri mutakhir struktur dan proses penyelenggaraan SPMP Tahun 2025 pada seluruh unit organisasi eselon I di lingkungan KKP, bersama ini kami sampaikan pertakutan capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Unit Organisasi Eselon I	Nilai Capaian	
		sebelum	menjadi
1.	Sekretariat Jenderal	90.43	90.62
2.	Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut	88.71	88.96
3.	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	87.80	88.18
4.	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	88.04	88.60
5.	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	88.71	88.16
6.	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	90.59	90.64
7.	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	90.17	91.76
8.	Inspektorat Jenderal	88.50	88.69
9.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	90.63	90.78
10.	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	88.50	89.12

Untuk rincian capaian target masing-masing unit organisasi eselon I sebagaimana terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah
diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami mengucapkan terima kasih.


Badan Sertifikasi Elektronik
Dida Diantanyah

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

4

No	Indikator Kinerja Mandatari (IKM)	Bobot	SETJEN	DJPR	DJPK	DJPT	DJPB	DJPSDPK	DJPSDKP	ITJEN	SPPSDMKP	SPPMHPK
7	Indeks Profesionalitas ASN (unit es 1)	10	8,04	8,41	8,48	8,60	8,44	8,71	8,92	8,74	8,66	8,59
8	Nilai pengawasan kearsipan internal (unit es 1)	10	9,01	9,25	9,25	9,62	9,58	9,75	9,35	9,37	9,91	8,50
9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (unit es 1)	5	4,56	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10	Nilai Pembangunan Integritas (unit es 1)	5	3,88	4,75	4,81	4,06	4,24	4,33	4,11	3,98	3,97	3,81
11	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang (unit es 1)	5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
12	Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP (unit es 1)	5	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,50	3,25	3,25	3,25
Nilai Implementasi RI			80,62	88,96	88,18	88,80	89,16	90,64	91,76	88,68	90,78	88,12

9

**CAPAIAN TARGET NILAI IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

No	Indikator Kinerja Mandatari (IKM)	Bobot	Range Nilai	Batas atas	Capaian (KU)	Nilai Indikator
1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja (unit es 1)	10	0-100	100	98,28	9,83
2	Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK (unit es 1)	10	100-0	100	99,96	10,00
3	Nilai PM SAKIP (unit es 1)	10	0-100	100	87,34	8,73
4	IKPA (unit es 1)	10	0-100	100	89,57	8,96
5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (unit es 1)	10	0-100	100	87,52	8,75
6	Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP (unit es 1)	10	1-5	5	3,94	7,89
7	Indeks Profesionalitas ASN (unit es 1)	10	0-100	100	84,37	8,44
8	Nilai pengawasan kearsipan internal (unit es 1)	10	0-100	100	90,60	9,06
9	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP (unit es 1)	5	0-100	100	100,00	5,00
10	Nilai Pembangunan Integritas (unit es 1)	5	0-100	100	84,54	4,24
11	Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di bidang (unit es 1)	5	0-100	100	100,00	5,00
12	Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP (unit es 1)	5	0-100	100	66,00	3,25
Nilai Implementasi RB DJPB						89,16



DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO.16 JAKARTA PUSAT TELP.
(021)3519070 EXT.7433 – FAX. (021) 3864293